



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMASALAHAN KERETA LAYANG RINGAN JABODETABEK

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Salah satu proyek pemerintah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan adalah Proyek Kereta Layang Ringan atau *Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek. Target waktu operasi Proyek Kereta Layang Ringan ini sudah mengalami tiga kali revisi. Awalnya, Kereta Layang Ringan Jabodetabek ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2021. Namun, target tersebut mundur dan pemerintah menjadwalkan *soft launching* layanan Kereta Layang Ringan pada bulan Agustus 2022. Akan tetapi, target tersebut kembali mundur hingga Bulan Oktober 2022 atau tepat bersamaan dengan pertemuan G20. Dan akhirnya, target operasi Kereta Layang Ringan ditunda kembali hingga Bulan Juni 2023.

Proyek Kereta Layang Ringan ini melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat BUMN tersebut meliputi PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Industri Kereta Api (INKA) (Persero), dan PT LEN Industri (Persero). Empat BUMN ini menjadi pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan Proyek Kereta Layang Ringan Jabodetabek. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *Crossrail International Ltd*, konsultan perkeretaapian asal Inggris, persiapan Proyek Kereta Layang Ringan Jabodetabek mengalami banyak permasalahan. Temuan tersebut diantaranya adalah (1) prasarana depo belum tersedia untuk skenario operasi pada tahun 2022; (2) belum lengkapnya poin yang harus dipenuhi dalam aspek *operational readiness*; (3) teknologi Kereta Layang Ringan Jabodetabek belum terpasang karena uji dinamis *rolling stock* atau armada kereta belum selesai; (4) pengembangan Kereta Layang Ringan Jabodetabek kurang komprehensif karena prosesnya dikerjakan secara terpisah oleh beberapa stakeholder terkait; (5) sebagai calon operator, keterlibatan PT KAI (Persero) dalam mempersiapkan sistem operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek masih sangat terbatas; dan (6) penyiapan sistem pemeliharaan dan layanan keamanan dalam proyek Kereta Layang Ringan Jabodetabek masih belum lengkap.

Temuan masalah dalam Proyek Kereta Layang Ringan Jabodetabek berdampak terhadap mundurnya peluncuran dan operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek. Kondisi ini menimbulkan potensi pembengkakan biaya investasi. PT KAI (Persero) telah terbebani *cost overrun* senilai Rp2,6 triliun karena mundurnya rencana operasi komersial Kereta Layang Ringan Jabodetabek dari akhir 2021 menjadi Agustus 2022. Biaya investasi proyek melambung dari Rp29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Hingga saat ini, PT KAI (Persero) telah menanggung biaya sebesar Rp22,3 triliun dengan kredit sindikasi. Sementara itu, sisanya yaitu lebih dari Rp10,2 triliun, melalui penyertaan modal negara kepada PT KAI (Persero).

Pada proyek yang dominan didukung oleh pinjaman, beban *cost overrun* terbesar umumnya timbul dari *interest during construction*. Biaya tersebut adalah bunga bank yang timbul karena tambahan masa konstruksi dan melesetnya jadwal operasi. Pemunduran kembali rencana operasional komersial Kereta Layang Ringan Jabodetabek hingga pertengahan tahun 2023 tentu akan menambah beban *cost overrun* dari proyek tersebut. Pada saat yang sama, keuangan negara juga telah menanggung beban Rp10,2 triliun karena harus menalangi proyek strategis nasional dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI (Persero).

Atensi DPR

Rencana operasi komersial Kereta Layang Ringan Jabodetabek mengalami tiga kali pemunduran hingga pertengahan tahun 2023. Pemunduran target operasi ini harus menjadi perhatian dan atensi DPR RI khususnya Komisi VI. DPR RI melalui Komisi VI harus dapat memastikan bahwa rencana operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek dapat dilakukan tepat waktu di pertengahan tahun 2023.

BUMN terkait, seperti PT KAI (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT INKA (Persero), dan PT LEN Industri (Persero) sebagai mitra Komisi VI harus dapat diminta keterangan terkait kepastian jadwal rencana dan persiapan operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek. Penundaan kembali operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek akan semakin menambah beban *cost overrun* dan beban keuangan negara yang telah diberikan kepada BUMN melalui PMN.

Sumber

Koran Tempo, 16, 17, 18, 19 dan 20 September 2022.

Minggu ke-3 September
(15 s.d. 21 September 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.